

POLITIK PERTANIAN

Penulis

Muhammad Fadly Abdina, S.P.,M.Si

Muhammad Alqamari, S.P.,M.P

Diterbitkan oleh:

Universitas Medan Area Press

POLITIK PERTANIAN

Penulis :

Muhammad Fadly Abdina, S.P., M.Si

Muhammad Alqamari, S.P., M.P

Desain Cover :

Hendra Gunawan, SE

Edit Layout :

Azam Azmi Azizih, SP

Editor

Ikbar Pratama, SE., M.Sc

Yuan Anisa, S.Si., M.Si

Annisa Zuhaira. S.Kom

ISBN

**Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
Atau seluruh isi buku ini tanpa seizin tertulis dari
Penerbit**

Diterbitkan oleh:

Universitas Medan Area Press

Address : Jalan Kolam Nomor 1, Kenangan Baru, Kec.

Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Sumatera Utara

Telephone : 061-7366878, e-mail:

umapress014@gmail.com

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	iv-ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I. TANTANGAN DAN PERMASAHAN	
PEMBANGUNAN PERTANIAN DI INDONESIA	1
I.1 Pengertian Pembangunan.....	1
1.1.1 Pengertian Pembangunan Menurut Para Ahli	3
1.1.2 Ciri-Ciri Pembangunan	5
1.1.3 Tujuan Pembangunan.....	8
1.1.4 Model-Model Pembangunan	9
1.1.5 FaktorPengambat Pembangunan	12
I.2 Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi	13
I.3 Permasalahan Pembangunan Pertanian Indonesia.....	21
BAB II. PENGERTIAN POLITIK PERTANIAN.....	30
II.1Defenisi Politik	30
II.2 Kekuasaan Politik	34
II.2.1 Pengertian Kekuasaan.....	34
II.2.2 Kedaulatan	36

II.3 Pengertian Pertanian.....	40
II.3.1 Definisi Pertanian/Agriculture Menurut Para Ahli.....	40
II.3.2. Pengertian Petani.....	43
II.4 Politik Pertanian	46
II.4.1 Sejarah Pertanian Indonesia.....	46
II.4.2. Pengertian Politik Pertanian	70
BAB III. RUANG LINGKUP POLITIK PERTANIAN.....	76
III.1Ruang Lingkup Politik Pertanian.....	76
III.2Kebijakan Sektor Produksi Pertanian	78
III.2.1 Kebijakan Produksi	78
III.2.2 Kebijakan Mencapai Swasembada Pangan	85
III.2.3 Diversifikasi Komoditi Pertanian.....	88
III.3 Kebijakan Sektor Industri Pertanian.....	92
III.4 Kebijakan Di Sektor Perdagangan Hasil	
Pertanian.....	107
III.5 Mekanisme Penguasaan Tanah.....	122
BAB IV. STRUKTUR DAN KARAKTERISTIK	
PERTANIAN DALAM PEMBANGUNAN	
EKONOMI	160
IV.1 Pertanian Sebagai Basis Pertumbuhan Ekonomi.....	160
IV.2 Pertanian Di Negara Berkembang	163
IV.3 Pertanian Di Negara Maju.....	165

BAB V. PERAN PERTANIAN DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI	168
V.1 Pertanian Sebagai Hasil Pangan.....	168
V.2 Pertanian Sebagai Penyedia Lapangan Pekerjaan	171
V.3 Pertanian Sebagai Pembentuk Output Nasional/PDB..	175
V.4 Pertanian Sebagai Penyumbang Ekspor Nasional.....	177
BAB VI. ORIENTASI PRODUKSI KOMUDITAS	
PERTANIAN.....	180
VI.1 Sistem Pertanian Berkelanjutan	182
VI.1.1 Defenisi Pertanian Berkelanjutan.....	182
VI.1.2 Mencapai Sistem Pertanian Berkelanjutan	187
VI.1.3 Tantangan Pertanian Berkelanjutan.....	189
VI.2 <i>Good Agricultural Practices</i>	190
VI.2.1 Pengertian <i>Good Agricultural Practices</i>	191
VI.2.2 <i>Good Agricultural Practices</i> di Indonesia	192
VI.3 Pengelolaan Pasca Panen.....	196
VI.3.1 Pengertian Pengelolaan Pasca Panen	196
VI.3.2 Teknologi Pasca Panen dan Permasalahannya.....	200
VI.3.3 Orientasi Produksi.....	210
BAB VII. PERANAN KELEMBAGAAN.....	213
VII.1 Peranan Kelembagaan Dalam Pertanian	214
VII.2 Kelembagaan Masyarakat Tani	2166

VII.3 Pembangunan Pertanian Melalui Penyuluhan.....	220
BAB VIII. PASAR, PEMERINTAH, DAN KEBIJAKAN.....	227
VIII.1 Peranan Pasar	229
VIII.2 Peranan Pemerintah.....	232
VIII.3 Peranan Kebijakan.....	237
BAB IX. KERANGKA DAN ANALISIS KEBIJAKAN	
PERTANIAN.....	245
IX.1 Kerangka Kebijakan Pertanian	245
IX.2 Analisis Kebijakan Pertanian.....	246
IX.2.1 Tujuan Analisis Kebijakan.....	246
IX.2.2 Peran Analisis Kebijakan	250
IX.2.3 Kendala Dalam Menganalisis Kebijakan.....	252
IX.2.4 Instrumen Analisis Kebijakan Pertanian.....	255
BAB X. KEBIJAKAN HARGA	266
X.1 Peranan Harga	266
X.2 Tujuan Kebijakan Harga	269
X.2.1 Pengertian Kebijakan Harga	269
X.2.2 Tujuan Kebijakan Harga	273
X.3 Kebijakan Harga Pemerintah.....	278
BAB XI. KEBIJAKAN PEMASARAN.....	282
XI.1 Fungsi Dan Saluran Pemasaran.....	282
XI.1.1 Fungsi Pemasaran.....	282

XI.1.2 Saluran Pemasaran	286
XI.2 Tujuan Kebijakan Pemasaran	288
XI.2.1 Tujuan Pemasaran	288
XI.2.2 Kebijakan Pemasaran	291
XI.3 Instrumen Kebijakan Pemasaran Pertanian	294
XI.3.1 Sistem Pemasaran Berkeadilan.....	296
XI.3.2 Sistem Pemasaran Efisiensi	298
BAB XII. KEBIJAKAN PERKREDITAN	302
XII.1 Kredit Pasar Dan Finansial.....	302
XII.1.1 PengertianKredit	302
XII.2.1 Pasar Keuangan.....	305
XII.2 Tujuan Dan Dasar Pemberian Kredit.....	308
XII.2.1 Tujuan Dan Fungsi Kredit	308
XII.2.2 Dasar Pemberian Kredit.....	314
XII.3 Kebijakan Kredit Indonesia.....	319
XII.3.1 Kendala Pembiayaan Bagi Petani Dan Nelayan ...	322
XII.3.2 Kredit Usaha Tani Mikro Solusi Bagi Petani Dan Nelayan	323
XII.3.3 Kredit Usaha MikroPertanian Solusi Bagi Petani Dan Nelayan	326
BAB XIII. KEBIJAKAN REFORMA AGRARIA	330
XIII.1 Permasalahan Reforma Agraria	332

XIII.2 Kebijakan Reforma Agraria	334
BAB XIV. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN	
MENUJU KESEJAHTERAAN.....	341
XIV.1 Model Pembangunan Negara	341
XIV.2 Kebijakan Pembangunan Pertanian Menuju	
Kesejahteraan.....	344
Daftar Pustaka.....	348

DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
1.	Rata-rata Hasil Tanaman Pangan	16
2.	Sektor Kerja dan Penyerapan Tenaga Kerja	172
3.	Kehilangan Hasil Panen Padi Pada Setiap Tahun, Penanganan Pasca Panen	203
4.	Estimasi Kehilangan Pasca Panen Padi di Negara Asia Tenggara.....	205

DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
1.	Kebijakan Pembangunan Pertanian.....	78
2.	Sistem Pasar Dan Efisiensi.....	109
3.	Kebijakan Pemerintah Dalam Menentukan Harga Terendah	112
4.	Kebijakan Pemerintah Dalam Menentukan Harga Tertinggi	114
5.	Dampak Pengenaan Pajak Pada Harga Barang dan Permintaan	115
6.	Keseimbangan Domestik dan potensi Pasar Jika Harga Dunia lebih Rendah Dari harga Domestik.....	117
7.	Keseimbangan Domestik dan potensi Pasar Jika Harga Dunia lebih Tertinggi Dari harga Domestik.....	118
8.	Keseimbangan Tanpa Dan Dengan Adanya Subsidi.....	120
9.	Hubungan Berbagai Bidang Kajian Dalam Lingkup Teknologi Pasca Panen	197
10.	Diagram Alur Penanganan Pasca Panen sayuran	209
11.	Alur Kerangka Kerja Kebijakan	244
12.	Pola Kredit Dan Pembayaran Kepada Petani Dan Nelayan	329

KATA PENGANTAR

Pertanian merupakan sektor andalan dalam menopang kemajuan suatu negara dengan kegiatan utamanya melakukan pemanfaatan sumberdaya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya.

Politik pertanian sebagai ilmu memberikan gambaran keberpihakan para pemangku kebijakan dalam pemerintahan kepada para pelaku usaha agribisnis khususnya petani. Politik pertanian bertugas menganalisis berbagai faktor yang perlu diperhatikan dalam merumuskan kebijakan dalam setiap aktivitas sektor pertanian. Faktor-faktor dimaksud mencakup ekonomi, sosial, politik, budaya, teknik budidaya, dan lain-lain.

Buku ini terdiri dari 14 Bab, yaitu : Tantangan Dan Permasalahan Pembangunan Pertanian Di Indonesia, Pengertian Politik Pertanian, Ruang Lingkup Politik Pertanian, Struktur Dan Karakteristik Pertanian Dalam Pembangunan Ekonomi, Peran Pertanian Dalam Pembangunan Ekonomi, Orientasi Produksi Komuditas Pertanian, Peranan Kelembagaan, Pasar, Pemerintah, Dan Kebijakan, Kerangka Dan Analisis Kebijakan, Kebijakan Harga, Kebijakan Pemasaran, Kebijakan Perkreditan, Kebijakan

Reforma Agraria, Dan Kebijakan Pembangunan Pertanian Menuju Kesejahteraan.

Penulisan buku ini, bermaksud untuk merangsang para Pihak/*stakeholders* Pertanian, utamanya dari kalangan akademisi, peneliti, pegiat LSM dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya untuk menuliskan pemahaman dan pengalamannya tentang Pembangunan Pertanian, khususnya di Indonesia.

Akhir kata, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada pihak UMA Press yang berkenan menerbitkan tulisan ini, juga disampaikan kepada rekan-rekan sejawat dan mahasiswa/mahasiswi kami yang telah banyak memberikan semangat dan sumber motivasi bagi penulis.

Medan, Desember 2022

Penulis

Muhammad Fadly Abdina, SP,.M.Si

SINOPSIS

Secara umum masyarakat luas memaknai politik hanya sebagai momentum pemilihan pada setiap prosesi politik yang terjadi ditengah masyarakat seperti Pemilihan Umum (Pemilu), Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), dan lainnya sehingga tidak jarang dengan adanya perbedaan sudut pandang pilihan mengakibatkan terjadi perdebatan dan pada akhirnya terjadi perselisihan yang mengakibatkan sebahagian besar masyarakat enggan untuk membahas soal politik.

Sejatinya politik merupakan suatu fenomena yang berkaitan erat dengan aktivitas keseharian manusia pada lingkungan bermasyarakat. Manusia Kodratnya merupakan makhluk sosial yang senantiasa hidup dinamis dan berkembang. Oleh karenanya politik merupakan gejala yang mewujudkan diri manusia dalam rangka proses perkembangannya ditengah masyarakat.

Politik pertanian pada dasarnya merupakan keberpihakan kebijakan pemerintah untuk mempermudah dan mempercepat laju pembangunan pertanian terutama dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. Dinamika politik yang terjadi pada tubuh pemerintah sudah semestinya harus berpihak pada kepentingan kemajuan pertanian dan kesejahteraan petani dalam hal penyediaan input produksi yang mudah dan terjangkau, sarana alat produksi pertanian yang memadai, dukkan pasca panen, perlindungan

harga, dukungan permodalan, dukungan penyuluhan, jaminan resiko, dan jaminan akses pasar bagi setiap produksi pertanian yang dihasilkan.

Disisi lain dukungan kebijakan/regulasi pembangunan sektor pertanian pada perusahaan-perusahaan pertanian perlu untuk diperhatikan, seperti : perusahaan-perusahaan pengangkutan, perkapalan, perbankan, asuransi atau lembaga-lembaga pemerintah dan swasta lainnya.

Penulisan buku ini didasari pada pengalaman penulis dalam melihat perkembangan dinamika sektor pertanian dan dalam proses memberikan mata kuliah Politik Pertanian di Fakultas Pertanian, yang mana mengalami kekurangan dan kesulitan dalam mencari referensi sumber pustaka. Harapannya buku ini dapat menjadi referensi para pihak maupun *stakeholders* pertanian, baik pemerintah maupun swasta dalam membuat kebijakan dan kegiatan-kegiatan dalam rangka memajukan sektor pertanian dan kesejahteraan petani serta dapat menjadi pegangan mahasiswa dalam mempelajari mata kuliah Politik Pertanian.